



Koridor Remitansi Malaysia Indonesia

Menjadikan Pengiriman Formal
Pilihan Terbaik
bagi Buruh Migran Perempuan
dan Buruh Migran Tidak Berdokumen

Ringkasan Laporan

Mei 2008



BANK DUNIA | THE WORLD BANK

Financial Market Integrity Unit

East Asia Social Development Unit



Koridor Remitansi Malaysia – Indonesia

Menjadikan Pengiriman Formal Pilihan Terbaik
bagi Buruh Migran Perempuan
dan Buruh Migran Tidak Berdokumen

RINGKASAN LAPORAN

Mei 2008



BANK DUNIA | THE WORLD BANK

Financial Market Integrity Unit

East Asia Social Development Unit

Koridor Remitansi Malaysia – Indonesia

Menjadikan Pengiriman Formal sebagai Pilihan Terbaik bagi Buruh Migran Perempuan dan Buruh Migran Tidak Berdokumen

Ringkasan Laporan

Kantor Perwakilan Bank Dunia Jakarta

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 12-13

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12910

Tel: (6221) 5299-3000

Fax: (6221) 5299-3111

Website: www.worldbank.org/id

www.worldbank.org/indonesia

Bank Dunia

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433, U.S.A.

Tel: (202) 458-1876

Fax: (202) 522-1557/1560

Website: www.worldbank.org

Dicetak pada bulan Mei 2008

Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia. Analisa, intepretasi, dan kesimpulan yang terdapat di dalamnya tidak mewakili Dewan Direksi Bank Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.

Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi, dan informasi lainnya yang tercantum pada peta yang ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasikan pandangan Bank Dunia akan status hukum suatu wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Singkatan dan Akronim	7
Data Statistik Koridor Remitansi Malaysia-Indonesia	9
Tabel ES1: Indikator Ekonomi Malaysia – Indonesia	9
Tabel ES2: Data Remitansi	10
Tabel ES3: Data Migrasi	11
Ringkasan Laporan	13
Pola Migrasi dan Remitansi Global	13
Kecenderungan Migrasi dan Remitansi Asia Timur dan Asia Selatan	14
Kecenderungan Migrasi dan Remitansi Indonesia	14
Malaysia sebagai Negara Pengirim Remitansi	16
Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia	16
Biaya Migrasi, Upah, dan Remitansi	17
Perkiraan Aliran Remitansi dalam Koridor Malaysia-Indonesia	18
Aliran Transaksi Formal	19
Aliran Transaksi Informal	20
Memutuskan antara Pilihan Pengiriman Formal dan Informal	21
Distribusi Remitansi di Indonesia melalui Mekanisme Pengiriman Formal	23
Distribusi Remitansi di Indonesia melalui Mekanisme Pengiriman Informal	23
Kesimpulan	25
Formal atau Informal: Perspektif Buruh Migran	25
Formal atau Informal: Perspektif Pembangunan	26
Formal atau Informal: Perspektif Sektor Keuangan	26
Rekomendasi Kebijakan Operasional	27
1. Menjadikan Sektor Formal Mudah Diakses dan Tanggap terhadap Buruh Migran	27
2. Memfasilitasi Buruh Migran dalam Mengakses Sektor Formal	29
3. Memformalkan dan Meregulasi Pihak-pihak Penyedia Jasa Informal sekaligus Menjaga Aksesibilitasnya bagi Buruh Migran	30
Penutup	31
Bibliografi	33

Daftar Gambar

Gambar 1. Tenaga Kerja Indonesia, Negara Tujuan Utama (1997-2006)	14
Gambar 2. Total Aliran Remitansi Masuk ke Indonesia per Propinsi, Januari-April 2007	16
Gambar 3. Pekerja Asing di Malaysia Berdasarkan Kewarganegaraan, Desember 2006	17
Gambar 4. Arus Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi (1997-2006)	18
Gambar 5. Aliran Remitansi Keluar dari Malaysia (1997-2006)	19
Gambar 6. Biaya Pengiriman Uang dalam Jumlah yang Berbeda, per US\$100, April 2007	20
Gambar 7. Pasar Remitansi antara Kedua Negara	22

Daftar Tabel

Tabel 1. Perkiraan Remitansi dalam Koridor Malaysia-Indonesia di Tahun 2006	19
Tabel 2. Perbandingan Insentif yang Dihadapi Buruh Migran Tidak Berdokumen	23

Daftar Kotak

Kotak 1. Risiko Pengiriman Informal	21
---	----

Kata Pengantar

Kolaborasi antara dua unit di Bank Dunia, *Financial Market Integrity Unit* dan *East Asia Social Development Unit*, menggabungkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai aliran remitansi dari Malaysia ke Indonesia. Bank Dunia telah memosisikan diri di jajaran terdepan dunia internasional dalam penelitian mengenai remitansi – dan *Financial Market Integrity Unit* memberi perhatian khusus pada analisa koridor-koridor remitansi bilateral dengan penekanan pada masalah-masalah integritas dan insentif-insentif khusus yang memberi dampak pada pilihan mekanisme pengiriman remitansi. Penelitian yang dilakukan oleh tim *East Asia Development Unit* tentang kerentanan buruh migran perempuan dan penggunaan remitansi menghasilkan satu sudut pandang kemanusiaan yang unik. Kedua sudut pandang tersebut tercermin dalam laporan *Koridor Remitansi Malaysia-Indonesia: Menjadikan Pengiriman Formal Pilihan Terbaik bagi Buruh Migran Perempuan dan Buruh Migran Tidak Berdokumen*

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, di mana jumlah buruh migran perempuan jauh melebihi buruh migran laki-laki. Karakteristik lain dari koridor ini adalah besarnya jumlah buruh migran yang tidak berdokumen. Meskipun demikian, aliran remitansi dari Malaysia ke Indonesia melalui pengiriman formal mengalami penurunan sejak 2002. Buruh migran menentukan pilihannya dalam cara mengirimkan dan memanfaatkan remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia, dan pilihan mereka saat ini jatuh pada pengiriman melalui jalur informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membuat jalur-jalur pengiriman menjadi lebih formal dapat memperbaiki pembangunan sektor keuangan dan penanggulangan kemiskinan melalui ketersediaan keamanan dan reliabilitas yang lebih baik, penurunan biaya, dan perbaikan pilihan investasi dengan hasil yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan perubahan-perubahan besar dalam pendekatan yang digunakan agar buruh migran kembali memilih jalur pengiriman formal.

Sementara itu, peranan penting jalur pengiriman informal dalam memberikan kemudahan bagi tenaga kerja perlu tetap mendapat perhatian. Perbaikan pengawasan terhadap kebijakan terkait, meskipun menjadi faktor penting, namun tetap harus memperhitungkan resiko yang mungkin timbul agar buruh migran tidak semakin terdorong untuk menggunakan jalur informal. Kebijakan harus mengutamakan penyediaan pasar yang berfungsi dan mendorong timbulnya pilihan-pilihan solusi, dan buruh migran perlu mendapat pengakuan atas kontribusi pentingnya dalam perekonomian serta perlu diberdayakan untuk dapat berinteraksi dengan pasar. Pasar remitansi juga dapat memperoleh manfaat dari adanya insentif yang lebih besar bagi dunia usaha yang dapat menawarkan layanan-layanan khusus bagi buruh migran terkait dengan data-data terbaru mengenai potensi pasar yang cukup besar dan menguntungkan untuk produk-produk dan layanan keuangan.

Satu perkembangan yang baik telah terjadi dengan dimulainya dialog kebijakan antara pejabat berwenang terkait di Indonesia dan Malaysia berkenaan dengan hasil analisa dari laporan ini. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mencari jalan keluar atas tantangan-tantangan yang ada untuk menciptakan pasar remitansi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan buruh migran yang berbeda-beda secara efisien dan dalam lingkungan yang aman dan terjamin.



Latifah Merican Cheong
Program Director
Financial Market Integrity Unit
Financial and Private Sector Development
The World Bank



Sarah Cliffe
Director
Strategy and Operations
East Asia and Pacific Region
The World Bank

Daftar Singkatan

AML/CFT	Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Aksi Terorisme (<i>Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism</i>)
AMLA	Undang-undang Anti Pencucian Uang (<i>Anti-Money Laundering Act</i>)
ATM	Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>)
BI	Bank Indonesia
BNI	Bank Negara Indonesia
BNM	Bank Negara Malaysia
CGAP	<i>Consultative Group to Assist the Poor</i>
CIMB	<i>Commerce International Merchant Bankers (Malaysia)</i>
FDI	Penanaman Modal Asing (<i>Foreign Direct Investments</i>)
FDIC	Lembaga Penjaminan Amerika Serikat (<i>Federal Deposit Insurance Corporation</i>)
FIU	Unit Intelijen Keuangan (<i>Financial Intelligence Unit</i>)
GDP	Produk Domestik Bruto (<i>Gross Domestic Product</i>)
GNI	Pendapatan Nasional Bruto (<i>Gross National Income</i>)
ID	Kartu Identitas/Tanda Pengenal (<i>Identification</i>)
IDR	Kode mata uang untuk Rupiah
IMF	Dana Moneter Internasional (<i>International Monetary Fund</i>)
IOM	Organisasi Internasional untuk Migrasi (<i>International Organization for Migration</i>)
IT	Teknologi Informasi (<i>Information Technology</i>)
MEPS	<i>Malaysian Electronic Payment System</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPTKLN	Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
RM	Ringgit Malaysia
Rp	Rupiah
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
UK	Inggris (<i>United Kingdom</i>)
US\$	Dolar Amerika Serikat (<i>United States dollar</i>)

Konversi nilai tukar untuk semua jumlah mata uang yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut (per 20 Juni 2007):

USD 1 (Dolar Amerika Serikat) = RM 3.4320 (Ringgit Malaysia)

USD 1 (Dolar Amerika Serikat) = Rp 8,940 (Rupiah Indonesia)

THE WORLD BANK GROUP

Vice President (EAPVP)	: James Adams
Vice President (FPDVP)	: Michael Klein
Country Director	: Joachim von Amsberg
EASSD Director	: Christian Delvoie
FPDFI Program Director	: Latifah Merican Cheong
EAS Sector Manager	: Sonia Hammam
Country Sector Coordinator	: Scott Guggenheim
Task Managers	: Raul Hernandez-Coss, Gillian Brown, Chitrawati Buchori
Task Team	: Isaku Endo, Emiko Todoroki, Tita Naovalitha, Wameek Noor, Cynthia Mar
Joint Donors	: UK Department for International Development



Data Statistik Koridor Remitansi Malaysia-Indonesia

Tabel ES1: Indikator Ekonomi untuk Malaysia-Indonesia

	Malaysia	Indonesia
Umum		
Jumlah Penduduk (juta, 2006)	25,8	223
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%tahun, 2006)	1,6	1,1
Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%tahun, 2006)	5,9	5,5
PDB (US\$ miliar, 2006)	148,9	364,5
Pendapatan Nasional Bruto(US\$ miliar, 2006)	141,4	315,8
PNB per Kapita (US\$, 2006)	5.490	1.420
Investasi Asing Langsung, aliran bersih (Neraca Pembayaran, US miliar, 2005)	3,97	5,26
Bantuan Pembangunan Luar Negeri dan Bantuan Luar Negeri(US\$ miliar, 2005)	0,03	2,52

Sumber: World Development Indicators database, April 2007

Tabel ES2: Data Remitansi*

Remitansi	Jumlah	Sumber
Total Aliran Remitansi Masuk ke Indonesia dari semua negara (US\$ miliar, 2006)	5,6	BI
Aliran Remitansi Resmi Masuk ke Indonesia dari semua negara (US\$ miliar, 2005)	1,9	BI
Total Remitansi Keluar dari Malaysia ke semua negara (US\$ miliar, 2005)	5,7	DSM**
Aliran Remitansi Resmi Keluar dari Malaysia ke semua negara (US\$ miliar, 2006)	2,1	BNM
Total Remitansi Resmi Masuk ke Indonesia dari Malaysia (US\$ miliar, 2006)	2,7	BI
Aliran Remitansi Resmi Keluar dari Malaysia ke Indonesia (US\$ miliar, 2006)	0,26	BNM
Aliran Remitansi Resmi Keluar dari Malaysia ke Indonesia (US\$ miliar, 2006)	0,24	BI
Presentase Remitansi Tidak Resmi terhadap Total Aliran Remitansi ke Indonesia	80%	BI ^a
Presentase Remitansi Tidak Resmi terhadap Total Aliran Remitansi ke Indonesia khususnya dari Malaysia	90%	BI ^b
Presentase Aliran Remitansi ke Indonesia terhadap Pendapatan Nasional Bruto (2006)	1,8	BI
Presentase Aliran Remitansi ke Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (2006)	1,5	BI
Rentang Jumlah Rata-rata Remitansi (survei anekdotal, US\$)	115-150	
Negara Penyumbang Aliran Remitansi Terbesar ke Indonesia	Malaysia	BI
Negara Penerima Aliran Remitansi Terbesar dari Malaysia	Indonesia	BNM
Kegiatan Remitansi		
Mekanisme Utama Pengiriman		Kurir Tunai, Transfer Elektronik
Perkiraan rata-rata biaya transfer per tahun melalui jalur perbankan untuk pengiriman dari Malaysia (US\$)	7	
Perkiraan rata-rata biaya transfer per tahun melalui jalur perbankan untuk penerimaan di Indonesia (US\$)	20	
Total Biaya Transfer Rata-Rata per Tahun (US\$) ^c	27	

* Data kategori yang sumbernya tidak disebutkan, adalah berasal dari hasil perhitungan unit FPDFI dan EASSO Bank Dunia yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan laporan ini.

** *Department of Statistics, Malaysia (DSM)*

^a Perkiraan remitansi resmi oleh BI menggunakan data statistik BI dan statistik ini berasal dari laporan bulanan bank-bank di Indonesia dan penyedia jasa pengiriman remitansi ketimbang perkiraan BI dalam statistik Neraca Pembayaran; prosedur penghitungan menurut perkiraan BI akan menghasilkan perkiraan aliran tidak resmi sebesar 70% (1,9/5,7*100).

^b (0,24/2,732*100 = kira-kira 90% dari aliran tidak resmi).

^c Biaya rata-rata untuk pengiriman didasarkan pada asumsi bahwa buruh migran mengirimkan uang dua kali setahun melalui saluran perbankan.

Tabel E3: Data Migrasi*

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)		
Perkiraan Jumlah TKI di Malaysia (berdokumen, 2007)	1,3 juta	MHAM**
Perkiraan Jumlah TKI di Malaysia (tidak berdokumen, 2007) ^a	700.000	MHAM**
Rentang Gaji Rata-Rata TKI di Malaysia per tahun (US\$) ^b	960-2040	MHAM**
Rentang Rata-Rata Biaya Migrasi per tahun (US\$)	343-475	
Rentang Total Biaya Migrasi dan Biaya Transfer per tahun (US\$)	370-502	
Presentase Biaya Migrasi dan Biaya Transfer Remitansi terhadap Gaji TKI (rata-rata rentang total biaya dan rentang gaji, US\$)	29	
Presentase Gaji yang dikirimkan sebagai Remitansi (rata-rata)	45%	BI

* Data kategori yang sumbernya tidak disebutkan, adalah berasal dari hasil perhitungan unit FPDFI dan EASSO Bank Dunia yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan laporan ini.

** *Ministry of Home Affairs, Malaysia.*

^a Kementerian Dalam Negeri Malaysia memperkirakan ada sekitar 700.000 buruh migran tidak berdokumen yang hampir mendekati jumlah semua TKI.

^b Perhitungan gaji setahun dilakukan dengan menghitung gaji rata-rata sebulan dikalikan 12; informasi mengenai gaji bulanan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.



Ringkasan Laporan

Tujuan utama dari laporan ini, *Koridor Remitansi Malaysia-Indonesia: Menjadikan Pengiriman Formal Pilihan Terbaik bagi Buruh Migran Perempuan dan Buruh Migran Tidak Berdokumen*, adalah untuk memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya para pembuat kebijakan dalam meningkatkan dampak remitansi bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta menjajaki pilihan-pilihan untuk menarik lebih banyak buruh migran dalam menggunakan sektor keuangan formal. Laporan ini memberikan gambaran mengenai koridor remitansi Malaysia-Indonesia dan merekomendasikan beberapa alur kebijakan untuk meningkatkan akses ke saluran-saluran pengiriman remitansi yang resmi, meningkatkan transparansi dari aliran dan struktur biaya, serta untuk memfasilitasi pengiriman remitansi, khususnya bagi para buruh migran tidak berdokumen dan buruh migran perempuan.

POLA MIGRASI DAN REMITANSI GLOBAL

Lebih dari 190 juta orang atau sekitar 3 persen dari penduduk dunia hidup di negara-negara di luar tempat kelahiran mereka.¹ Remitansi global telah mengalami peningkatan selama dekade terakhir dan aliran remitansi ke negara-negara berkembang yang tercatat selama tahun 2006 diperkirakan berjumlah US\$204 miliar. Namun demikian, jumlah sebenarnya, termasuk yang tidak tercatat yang mengalir melalui saluran formal (resmi) dan informal (tidak resmi), dipercaya jauh lebih besar.²

¹ World Bank, *Atlas of Global Development: A Visual Guide to the World's Greatest Challenges* (Washington, D.C.: HarperCollins and World Bank, 2007)

² World Bank, *Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration 2006*, (Washington, D.C.: World Bank, 2005)

KECENDERUNGAN MIGRASI DAN REMITANSI ASIA TIMUR DAN ASIA SELATAN

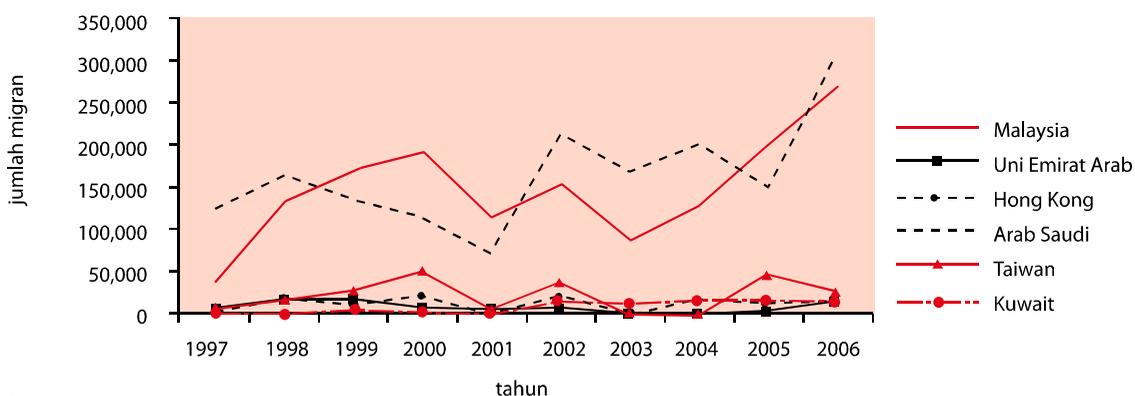
Seperempat sampai sepertiga dari keseluruhan arus migrasi internasional berasal dari sembilan negara pengirim migran terbesar: Filipina, India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Thailand, Cina, Sri Lanka, dan Myanmar.³ Menurut data negara pembayaran IMF di tahun 2005, wilayah Asia Timur dan Pasifik secara keseluruhan menghasilkan US\$45 miliar atau 17 persen dari aliran remitansi global yang tercatat. Studi yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM) di tahun 2005 menemukan tiga kecenderungan penting dalam migrasi di Asia:⁴ a) semakin banyak migran dari Asia Selatan dan Asia Timur mencari pekerjaan di negara yang letaknya dekat dengan negara asal mereka; b) arus buruh migran di wilayah ini diperkirakan semakin banyak terdiri dari buruh migran tidak berdokumen; c) terakhir, semakin banyaknya perempuan di antara buruh migran dari Asia Selatan dan Asia Timur.

KECENDERUNGAN MIGRASI DAN REMITANSI INDONESIA

Selama tahun 2006, 680.000 Tenaga Kerja dari Indonesia berangkat ke luar negeri melalui proses kontrak resmi untuk bekerja di negara-negara tujuan.⁵ Jumlah TKI di luar negeri diperkirakan sekitar 4,3 juta orang. Migrasi mengalami peningkatan secara tetap sejak awal tahun 1980-an dan jumlah buruh perempuan secara konsisten melampaui jumlah buruh laki-laki.

Terjadi peningkatan yang cepat dan tetap dalam migrasi ke Malaysia dari Indonesia sejak tahun 2003 (Gambar 1). Dari jumlah orang Indonesia yang diizinkan bekerja di luar negeri tahun 2006, 85 persen di antaranya berangkat ke Arab Saudi dan Malaysia.⁶ Hampir 80 persen dari semua TKI yang berangkat tahun 2006 adalah perempuan dan 88 persen dari kaum perempuan ini bekerja di sektor informal. Para buruh migran umumnya berasal dari sejumlah daerah tertentu di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Oleh karena itu, remitansi yang mengalir ke Indonesia juga cenderung terkonsentrasi di provinsi-provinsi tersebut.

Gambar 1: Tenaga Kerja Indonesia, Negara Tujuan Utama (1997-2006)



Sumber: Depnakertrans, Indonesia

³ *World Migration Report* (Geneva: IOM, 2005)

⁴ *World Migration Report* (Geneva: IOM, 2005)

⁵ BNP2TKI dan Depnakertrans.

⁶ Direktorat Jenderal PPTKLN.

Dalam tahun 2006, neraca pembayaran IMF mencatat US\$5,7 miliar remitansi ke Indonesia dari seluruh dunia.

Angka ini dihitung berdasarkan jumlah buruh migran dan perkiraan survai atas jumlah kontrak dan presentase remitansi yang dikirim ke negara asal. Metodologi ini mulai diperkenalkan pada tahun 2005 ketika disadari bahwa jumlah US\$1,9 miliar yang dilaporkan bank⁷ dan lembaga keuangan non-bank⁸ adalah jumlah perkiraan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya. Dengan menggunakan metodologi baru, angka tahun 2005 direvisi menjadi US\$5,3 miliar⁹ dan terus meningkat sejak saat itu.

Hanya sekitar 10 persen dari kabupaten-kabupaten di Indonesia yang mengirimkan buruh migran dalam jumlah yang signifikan ke luar negeri. Karena itu, walaupun tingkat remitansi mungkin terlihat kecil dibandingkan dengan total PDB, namun jumlah tersebut sangat berarti dalam konteks lokal. Di provinsi-provinsi tertentu di Indonesia, aliran remitansi jauh lebih besar dari total pendapatan daerah setempat.¹⁰ Misalnya, dalam kuartal pertama 2007, diperkirakan bahwa migran dari Jawa Timur mengirimkan remitansi lebih dari US\$90 juta khusus ke daerah asal mereka di Jawa Timur, yang merupakan 62 persen dari total aliran remitansi yang masuk ke Indonesia¹¹ (Gambar 2). Dalam kenyataannya, hampir 90 persen remitansi yang masuk ke Indonesia mengalir ke Pulau Jawa yang padat penduduknya.

Sebagian besar migran berasal dari daerah pedesaan di mana terdapat tingkat kemiskinan tertinggi; karena itu, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan selayaknya dapat diperkirakan. Namun demikian, belum ada informasi mengenai dampak ekonomi makro dari remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi, efeknya terhadap pengentasan kemiskinan, dan sejauh mana aliran tersebut telah mempengaruhi indikator kesejahteraan sosial bagi masyarakat penerima remitansi. Terlebih lagi, penelitian kualitatif mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang yang signifikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi dari remitansi guna mencapai kesejahteraan sosial yang berkesinambungan.



⁷ Dari 138 bank setempat, 104 melaporkan transaksi devisa.

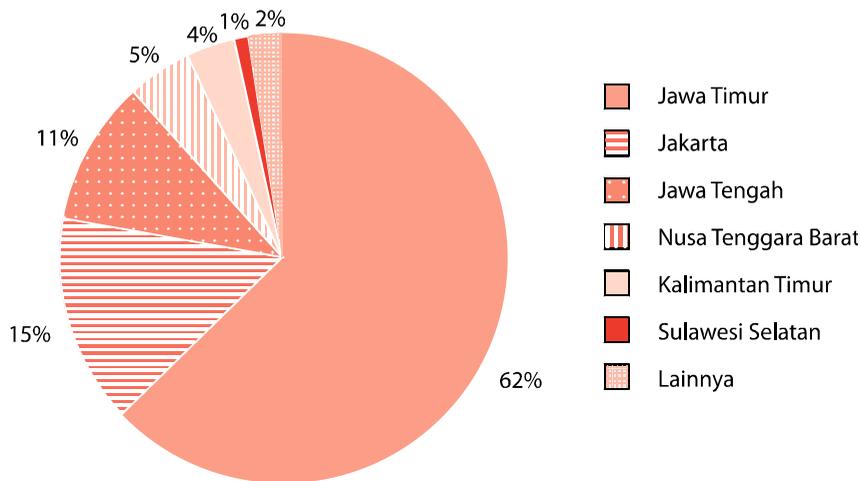
⁸ Lembaga-lembaga keuangan non-bank adalah: perusahaan asuransi, sekuritas, keuangan, dan *trust*.

⁹ Bank Indonesia, *Balance of Payment Statistics, 2004-2006, Balance of Payment Summary Chart* (Jakarta, 2007)

¹⁰ Hal ini terjadi di Nusa Tenggara Barat yang menerima remitansi berjumlah lebih dari Rp 300 miliar dalam tahun 2002, jauh melampaui pendapatan daerah yang berjumlah Rp.61 miliar di tahun 2001. Sukamdi, Elan Striawan dan Abdul Haris, "Impact of Remittances on the Indonesian Economy," dalam Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin (eds), *International Migration in Southeast Asia* (Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2004), hal 155.

¹¹ Badan Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Gambar 2: Total Aliran Remitansi Masuk ke Indonesia per Propinsi, Januari-April 2007



Sumber: BP2TKI

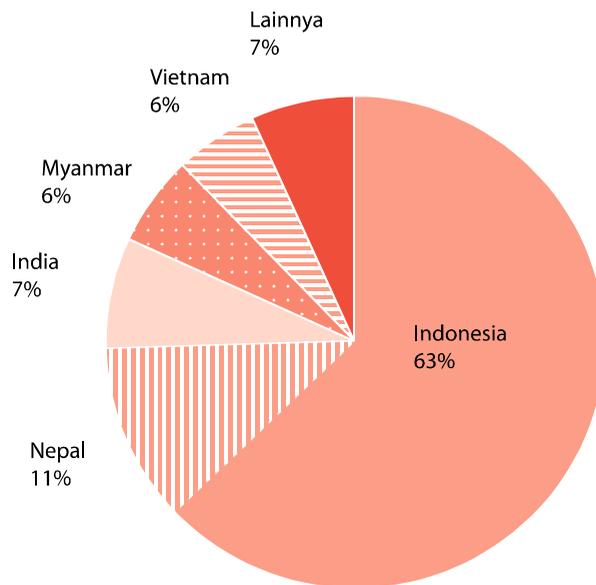
MALAYSIA SEBAGAI NEGARA PENGIRIM REMITANSI

Bank Negara Malaysia (BNM) mencatat US\$1,8 miliar aliran dana keluar melalui bank-bank dan penyedia jasa pengiriman remitansi selama tahun 2005. Namun demikian, perhitungan alternatif berdasarkan survai acak yang dilakukan oleh Departemen Statistik Malaysia menghasilkan perkiraan jumlah keseluruhan remitansi keluar sebesar US\$5,7 miliar di tahun 2005.

TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA

Tenaga Kerja Indonesia merupakan kelompok buruh migran terbesar di Malaysia, berjumlah lebih dari 60% dari total buruh migran¹² (Gambar 3). Malaysia merupakan negara tujuan yang menarik bagi Tenaga Kerja Indonesia karena kedekatan letak geografis serta kemiripan budayanya, menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan yang relatif nyaman bagi buruh migran. Gambar 4 memperlihatkan rincian data buruh migran laki-laki dan perempuan yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi melalui jalur formal (resmi). Arus migrasi ke kedua negara tersebut sebagian besar terdiri dari buruh migran perempuan dengan presentase yang berangkat ke Arab Saudi (90%) lebih tinggi dari yang berangkat ke Malaysia (60%). Migrasi yang terorganisir (resmi) antara Indonesia-Malaysia telah diperkuat dengan *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani di tahun 2004 dan 2006.

¹² Kementerian Dalam Negeri Malaysia

Gambar 3: Pekerja Asing di Malaysia Berdasarkan Kewarganegaraan, Desember 2006

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Malaysia

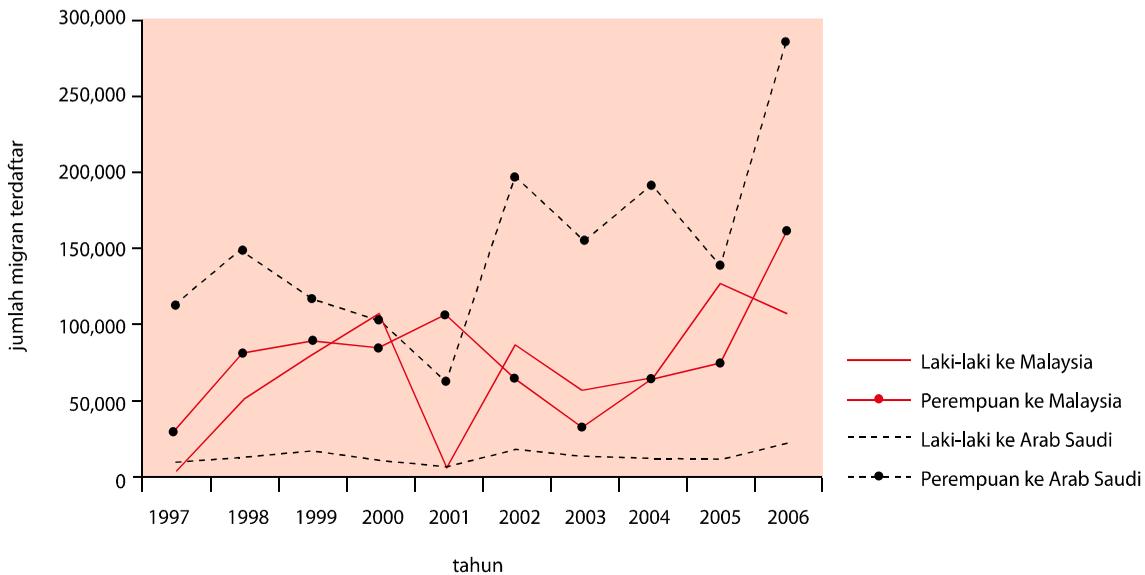
Perkiraan penghitungan terbaik mengindikasikan terdapat 1,2 juta buruh migran tidak berdokumen di Malaysia dan 60 persen di antaranya berasal dari Indonesia.¹³ Migran tidak berdokumen cenderung bekerja di bidang perkebunan, konstruksi, pertanian, tambak ikan, dan industri jasa. Buruh migran tidak berdokumen pada dasarnya tidak memiliki perlindungan hukum dan dalam beberapa kasus, para majikan mengambil keuntungan dari status keimigrasian tersebut saat mempekerjakan mereka.

BIAYA MIGRASI, UPAH, DAN REMITANSI

Terdapat biaya yang signifikan berkaitan dengan proses migrasi, seperti biaya administrasi, biaya penempatan, akomodasi dan biaya sehari-hari sebelum keberangkatan, serta biaya transportasi. Buruh migran terpaksa meminjam uang untuk mencukupi biaya-biaya tersebut dan dengan terbatasnya akses ke sektor keuangan formal, mereka seringkali terpaksa meminjam dari penyedia jasa pinjaman informal, termasuk agen perekrut tenaga kerja yang kemudian akan memotong upah yang mereka terima sebagai mekanisme pembayaran hutang tersebut. Rata-rata upah buruh migran di Malaysia adalah antara US\$90 dan US\$200 per bulan dan hanya sedikit saja selisih upah yang dibayarkan antara buruh migran laki-laki dan perempuan. Survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI) memperkirakan sekitar 45 persen dari penghasilan buruh migran dikirim sebagai remitansi ke Indonesia.

¹³ "Southeast Asia", *Migration News*, Vol. 14 No. 3, Juli 2007

Gambar 4: Arus Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dan Arab Saudi (1997-2006)



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Malaysia

PERKIRAAN ALIRAN REMITANSI DALAM KORIDOR MALAYSIA-INDONESIA

Menurut Bank Indonesia, jumlah keseluruhan remitansi yang masuk ke Indonesia dari Malaysia di tahun 2006 adalah sekitar US\$2,7 miliar, dihitung berdasarkan metodologi mereka yang terbaru. Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa sekitar 9-10 persen dari remitansi yang masuk ke Indonesia dari Malaysia mengalir melalui jalur formal (resmi). Lebih khusus lagi, BI memperkirakan bahwa sekitar \$0,26 miliar ditransfer ke Indonesia dari Malaysia melalui sistem formal pada tahun 2006 (berdasarkan laporan dari bank-bank dan penyedia jasa pengiriman remitansi). Tabel 1 memperlihatkan angka remitansi resmi dalam koridor Malaysia-Indonesia dan perkiraan terakhir BI atas aliran masuk berdasarkan metodologi terbaru. Untuk tujuan laporan ini, tim studi memperkirakan penghitungan remitansi BI sebesar hampir US\$2,7 miliar untuk tahun 2006 dalam koridor Malaysia-Indonesia mungkin merupakan perkiraan yang paling mendekati jumlah remitansi yang dikirimkan ke Indonesia dari Malaysia.

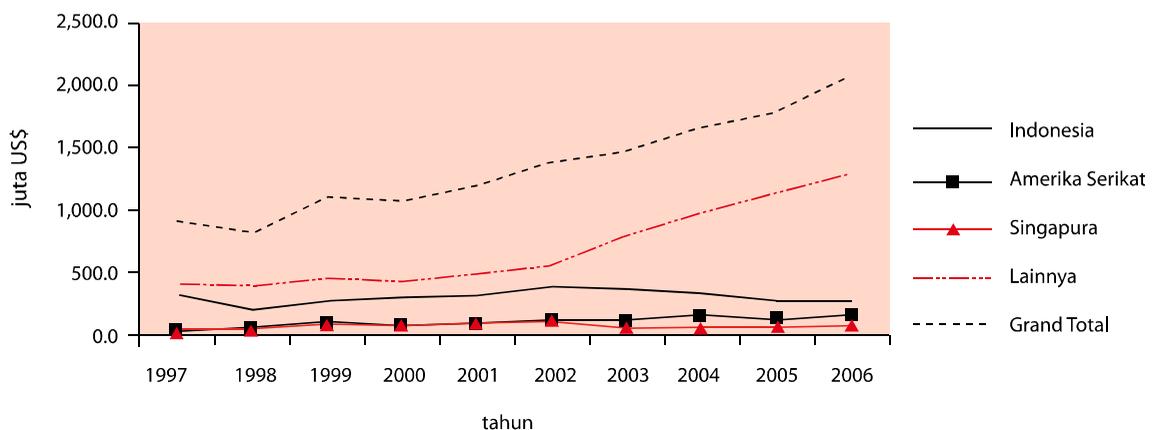
Remitansi dari Malaysia ke Indonesia melalui saluran-saluran formal turun lebih dari 30 persen dari jumlah tertinggi sebesar US\$387 juta tahun 2002 menjadi US\$262 juta pada tahun 2006 (Gambar 5). Hal ini terjadi meskipun jumlah buruh migran yang berangkat ke Malaysia naik secara signifikan. Implikasinya adalah semakin banyak buruh migran yang memilih alternatif saluran lain dalam mengirimkan remitansi. Faktor-faktor penyebabnya dijabarkan dalam alinea-alinea berikut.

Tabel 1. Perkiraan Remitansi dalam Koridor Malaysia-Indonesia di Tahun 2006

	Laporan bank dan penyedia jasa pengiriman remitansi (formal)	Perkiraan berdasarkan sampling atau jumlah migran	Presentase yang dikirim melalui saluran formal
Malaysia Remitansi yang dikirim ke Indonesia	US\$0,26 miliar^a <i>Sumber:</i> Bank Negara Malaysia	Maksimum US\$3,6 miliar^b <i>Sumber:</i> Perkiraan kasar Bank Dunia berdasarkan jumlah buruh migran dan survei sampling Departemen Statistik Malaysia	Sekitar 10% <i>Sumber:</i> Bank Indonesia
Indonesia Remitansi yang diterima dari Malaysia	US\$0,24 miliar <i>Sumber:</i> Bank Indonesia, laporan bank dan penyedia jasa pengiriman remitansi	US\$2,66 <i>Sumber:</i> Angka Bank Indonesia, dihitung berdasarkan jumlah migran	

^a Angka US\$0,26 miliar dari BNM di tahun 2006 memperlihatkan total aliran dana keseluruhan dari Malaysia ke Indonesia termasuk upah dan remitansi buruh migran.

^b Angka berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Malaysia tahun 2005 yang menyebutkan 63 persen dari total pekerja asing di Malaysia adalah TKI. Diperkirakan bahwa proporsi yang sama dari total neraca pembayaran remitansi yang dikeluarkan, akan masuk ke Indonesia atau sejumlah US\$ 3.59 miliar. Namun, mengingat terdapat transfer yang cukup signifikan ke negara-negara industri maju (Amerika Serikat, Inggris, Singapura) dalam jumlah yang lebih besar, angka ini kemungkinan besar jauh di atas jumlah yang sebenarnya.

Gambar 5: Aliran Remitansi Keluar dari Malaysia (1997-2006)

Sumber: Bank Negara Malaysia, berdasarkan laporan bank dan penyedia jasa pengiriman remitansi

ALIRAN TRANSAKSI FORMAL

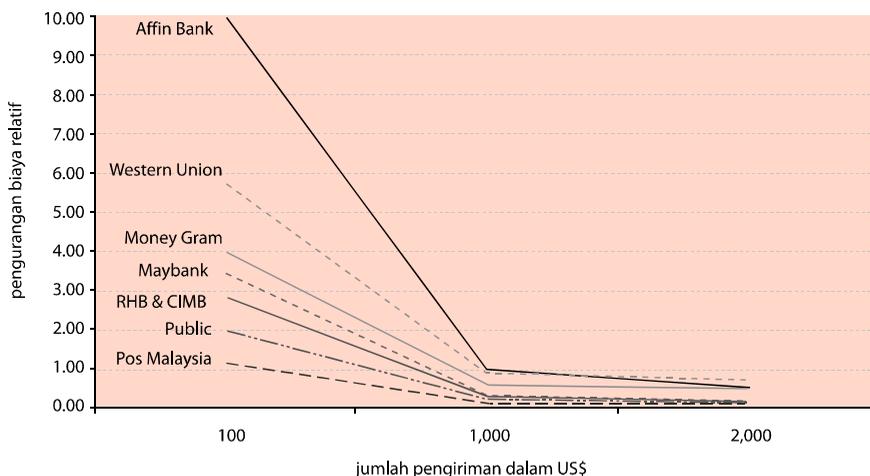
Sembilan puluh persen dari transfer remitansi resmi dilakukan melalui lembaga perbankan¹⁴ sementara sisanya disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan non-bank.¹⁵ Menurut beberapa bank, rata-rata transaksi bisa mencapai US\$87 sampai US\$146, dan remitansi tersebut dikirim paling tidak dua kali dalam setahun. Studi yang dilakukan Bank Indonesia belum lama ini

¹⁴ 22 bank komersil, 11 bank Islam, 1 bank tabungan nasional, 6 operator remitansi non-bank, 1 kantor pos Malaysia.

¹⁵ Wawancara dengan pejabat Bank Nasional Malaysia, April 2007

menemukan bahwa TKI umumnya mengirimkan 40-50 persen dari penghasilan mereka sebagai remitansi, yang mengimplikasikan bahwa sebenarnya jumlah aliran yang disalurkan melalui saluran-saluran informal (tidak resmi) adalah lebih besar.¹⁶ Biaya untuk mengirimkan uang dari Malaysia beragam, namun kebanyakan penyedia jasa pengiriman formal memberlakukan struktur tarif yang regresif di mana biaya mengirim kelipatan US\$100 akan menurun dengan semakin banyaknya jumlah uang yang dikirim (Gambar 6).

Gambar 6: Biaya Pengiriman Uang dalam Jumlah yang Berbeda, per US\$100, April 2007



Sumber: Wawancara dengan berbagai penyedia jasa pengiriman remitansi

Persyaratan dokumen tanda pengenal juga dapat menjadi penghalang, khususnya bagi buruh migran tidak berdokumen. Sejak 11 September 2001, peraturan perundangan di mana sektor perbankan beroperasi telah diperketat untuk mencegah kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Peraturan-peraturan baru antara lain mensyaratkan adanya dokumen tanda pengenal yang dapat dipercaya. Bagi penyedia jasa pengiriman remitansi, paspor merupakan dokumen tanda pengenal utama bagi orang asing dalam melakukan pengiriman remitansi.¹⁷ Untuk membuka rekening tabungan, lembaga-lembaga ini mensyaratkan dokumen izin kerja, selain paspor, dan dalam beberapa kasus juga mengharuskan pimpinan kantor cabang lembaga tersebut untuk memberi persetujuan saat pembukaan rekening.

ALIRAN TRANSAKSI INFORMAL

Pemanfaatan saluran-saluran informal sangat dominan dalam koridor ini. Saluran-saluran ini meliputi agen penukaran mata uang (*money changer*), jasa kurir, pengiriman via orang lain, atau agen perekrut tenaga kerja. Penggunaan saluran informal, tanpa sengaja, telah dipersubur oleh sistim keagenan. Para perantara yang memperkenalkan calon buruh migran kepada agen perekrut tenaga kerja dapat saja mendanai biaya migrasi terlebih dahulu. Setelah itu, buruh migran harus mengirimkan sebagian dari penghasilannya kepada perantara tersebut untuk membayar hutangnya. Dengan biaya tambahan, perantara tersebut juga dapat menyampaikan kiriman

¹⁶ Wawancara dengan Bank Indonesia.

¹⁷ Termasuk Pos Malaysia.

uang kepada keluarga para buruh migran. Mereka terus menggunakan “sistim” ini walaupun hutang mereka sudah lunas. TKI yang pulang dapat juga membawakan uang kiriman buruh migran lainnya. Kurir remitansi ini, yang bisa merupakan teman dekat atau bukan teman dekat atau anggota keluarga dari buruh migran, menanggung resiko yang cukup besar saat tiba di pos pemeriksaan bea cukai dan resiko kehilangan karena dirampok (Kotak 1).

Untuk beberapa kasus transfer informal, dana disalurkan melalui tangan perantara atau promotor imigrasi. Biro jasa penukaran mata uang (*money changer*) memberikan uang tunai kepada seseorang yang akan membawa uang tersebut ke Indonesia atau dapat pula menggunakan rekening bank mereka untuk mengirimkan dana.¹⁸ Seorang perantara atau promotor imigrasi meminjamkan uang kepada buruh migran yang akan membayarnya kembali dari penghasilannya. Para perantara biasanya melakukan perjalanan dari Indonesia ke Malaysia untuk mengumpulkan uang pembayaran pinjaman dan dapat pula membawanya kembali ke Indonesia untuk disampaikan kepada keluarga buruh migran.¹⁹

Biro jasa penukaran mata uang tampak memainkan peran signifikan dalam koridor ini. Banyak biro jasa penukaran mata uang merupakan bisnis formal (resmi) karena mereka diatur dengan undang-undang dalam fungsinya sebagai agen penukaran mata uang asing. Namun demikian, ketika mereka memberikan pelayanan sebagai penyedia jasa pengiriman remitansi, aliran dana tersebut tidak diatur atau terukur. Langkah-langkah telah diambil guna merevisi *Exchange Act* untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi biro penukaran mata uang untuk dapat melakukan pengiriman remitansi.

Kotak 1. Risiko Pengiriman Informal

“Pada awalnya, saya menabung penghasilan saya. Ketika seorang teman bermaksud pulang, saya beri dia sejumlah uang untuk disampaikan kepada orang tua saya. Saya bertemu dia di kantor agen. Saya belum begitu mengenal dia, namun saya percaya saja. Dia berasal dari Desa Beber, tidak jauh dari Barabali. Orang tua saya menerima uang tersebut sebulan kemudian. Saya telepon keluarga saya di kampung dan saya katakan bahwa saya telah mengirimkan RM 1,450, namun mereka bilang hanya menerima Rp 1 juta yang dibayarkan dengan tiga kali angsuran. Sebetulnya mereka seharusnya menerima senilai RM 1,450 atau sekitar Rp 2,25 juta.”

Susi, 28 tahun, Desa Barabali, Lombok Tengah

MEMUTUSKAN ANTARA PILIHAN PENGIRIMAN FORMAL DAN INFORMAL

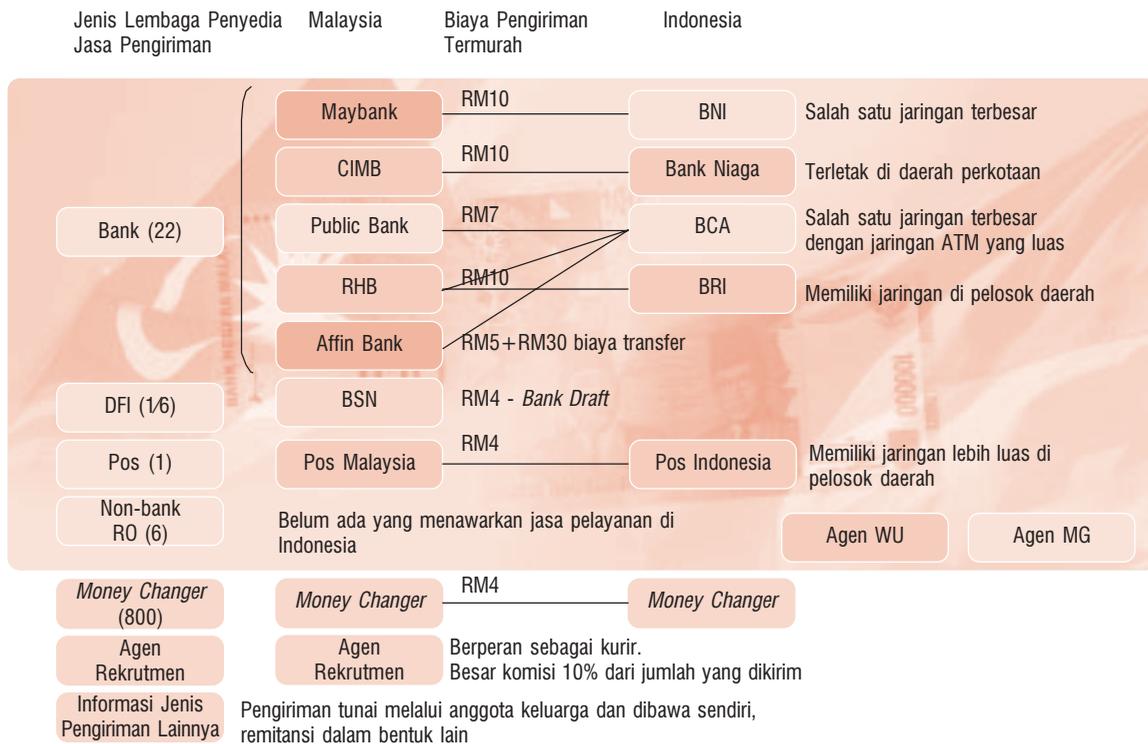
Secara teori, seorang buruh migran mempunyai berbagai pilihan penyedia jasa pengiriman remitansi. Dalam koridor Malaysia-Indonesia, terdapat penyedia-penyedia jasa formal (resmi) dan informal (tidak resmi): bank, biro jasa penukaran mata uang, kantor pos, operator pengiriman uang, mediator rekening, atau perantara. Karena kedekatan letak (geografis) kedua negara, mengirim uang ke kampung melalui anggota keluarga atau kerabat juga merupakan pilihan yang nyaman. Gambar 7 memperlihatkan seluruh pasar remitansi antara Malaysia dan Indonesia.

¹⁸ Walaupun merupakan saluran bank resmi, hal ini dianggap sebagai remitansi informal karena penerima tidak dikenal atau tercatat. Tidak begitu jelas bagaimana remitansi yang dikirim melalui biro penukaran mata uang didistribusikan saat uang tersebut sampai di Indonesia.

¹⁹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan staf Bank Dunia dengan perantara dan TKI.

Gambar ini merinci penyedia jasa-jasa formal dan informal di Malaysia, biaya jasa termurah mereka dan mitra kerja mereka di Indonesia.

Gambar 7: Pasar Remitansi antara Kedua Negara



Sumber: Wawancara yang dilakukan Bank Dunia

Berbagai faktor mempengaruhi pilihan-pilihan yang diambil oleh buruh migran, termasuk:

- **Akses fisik.** Kemudahan buruh migran untuk mengakses secara fisik penyedia jasa pengiriman remitansi di Malaysia. Hal ini dapat ditentukan oleh jarak dan kemampuan mereka untuk meninggalkan tempat kerja selama jam operasi (buka).
- **Akses kelembagaan.** Kemudahan bagi buruh migran untuk mengurus persyaratan administrasi dan juga suasana yang bersahabat, atau mudahnya menjangkau penyedia jasa pengiriman remitansi.
- **Akses peraturan.** Tingkat peraturan dan persyaratan yang dapat membatasi akses.
- **Biaya.** Terdapat variasi yang besar dalam biaya-biaya untuk pengiriman uang.
- **Persaingan.** Adanya sumber-sumber lain yang menyediakan akses lebih mudah dengan biaya yang lebih murah.
- **"Melek" mengenai keuangan.** Banyak penerima tidak mengetahui apakah biaya administrasi dipotong dari jumlah yang mereka terima melalui bank. Nilai tukar mata uang asing juga memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan jumlah uang yang diterima oleh keluarga TKI. Dari diskusi tim penulis laporan dengan buruh migran yang telah kembali, diketahui bahwa pengalaman mereka di luar negeri telah memberikan pemahaman secara umum kepada mereka mengenai mekanisme keuangan yang mereka pelajari, baik dari pengalaman pahit mereka sendiri maupun melalui pengalaman pahit

orang lain. Bagaimana pun, meningkatkan “kemelekan” buruh migran mengenai keuangan sebelum berangkat dapat mencegah mereka dari pengalaman pahit sejenis.

Insentif utama dalam menggunakan mekanisme pengiriman remitansi secara formal dan informal bagi TKI diperbandingkan dalam Tabel 2.

Tabel 2: Perbandingan Insentif yang Dihadapi Buruh Migran Tidak Berdokumen

Insentif	Bank	Pos (wesel)	Operator Pengiriman Uang	Penukaran Uang	Saluran Informal
Akses tanpa dokumen tanda pengenalan	tidak	tidak	tidak	ya	ya
Cakupan geografis di Malaysia	terbatas	bagus	terbatas	tidak diketahui	bagus
Nilai biaya relatif	bervariasi	tidak mahal	mahal	tidak mahal	tidak diketahui
Kecepatan	sedang-lambat	lambat	cepat	cepat	bervariasi
Halangan bahasa	bervariasi	bervariasi	bervariasi	bervariasi	tidak ada
Sedikit persyaratan administrasi	tidak	tidak	tidak	ya	ya

Sumber: Bank Dunia berdasarkan wawancara dengan TKI dan penyedia jasa pengiriman remitansi

DISTRIBUSI REMITANSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME PENGIRIMAN FORMAL

Sektor keuangan di Indonesia sangat luas dan beragam, meliputi tiga tingkatan penyedia jasa perbankan. Bank pemerintah, Bank Rakyat Indonesia, adalah penyedia utama jasa perbankan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah namun tetap meraih keuntungan. Beroperasi dengan 4.600 kantor tingkat desa, bank ini memiliki 30 juta nasabah, sehingga menjadikannya sebagai bank terbesar dalam jumlah nasabah di Indonesia. Di samping itu, Bank Perkreditan Rakyat memiliki sekitar 6 juta nasabah. Nasabah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat diperkirakan mencapai dua pertiga dari jumlah semua nasabah bank. Bagaimana pun, penetrasi perbankan masih tetap rendah dengan 20-30 persen orang dewasa yang diperkirakan mempunyai rekening tabungan.²⁰

Distribusi remitansi yang diterima di Indonesia melalui saluran formal terpusat di sektor perbankan. Biaya untuk membuka dan memelihara sebuah rekening relatif tinggi dan biaya yang dikenakan oleh bank-bank di Indonesia lebih tinggi dari yang dikenakan bank-bank di Malaysia. Cakupan Pos Indonesia terbatas hanya pada 50 kantor cabang yang mampu mendistribusikan remitansi dengan cepat. Selain itu, walaupun termasuk dalam sistim formal, nasabah tidak secara otomatis terlindung dari permainan komisi siluman dan tambahan biaya untuk “fasilitator.”

DISTRIBUSI REMITANSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME PENGIRIMAN INFORMAL

Masalah kenyamanan dan adanya permasalahan mengakses bank menyuburkan peran para mediator keuangan dan fasilitator, hingga meningkatkan biaya penerimaan remitansi. Mediator

²⁰ *Genesis Analytics, Implementing FATF Standards in Developing Countries and Financial Inclusion: Findings and Guidelines* (dalam proses).

akan menerima uang tunai dari rekeningnya yang mana uang tersebut dikirimkan dari Malaysia dan kemudian membawanya (sebagai jasa kurir) kepada penerima yang berhak. Para fasilitator dipercayakan untuk berbagai kegiatan, beberapa di antaranya hanya bertindak sebagai penyampai pesan ke para penerima bahwa mereka telah menerima remitansi, sedangkan yang lainnya mengantri di bank atas nama penerima atau menukarkan uang tunai di luar bank dengan nilai yang lebih baik. Para “mediator keuangan” adalah pihak yang memainkan peran paling kritis dalam pendistribusian remitansi.

Pada bulan Desember 2006, Bank Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mengizinkan agen penyedia jasa remitansi untuk melakukan pengiriman remitansi.²¹ Peraturan baru ini membuka pasar bagi penyedia jasa pengiriman remitansi baru yang berbeda dari bank, mengakui peran operator informal dalam pengiriman uang. Peraturan baru ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan saluran-saluran remitansi oleh para pelaku pencucian uang. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap nasabah dalam kegiatan pengiriman remitansi (uang). Operator yang ditangani dengan baik melalui legislasi yang tepat akan menciptakan perlindungan hukum, jaminan, dan keamanan baik bagi pengirim maupun penerima remitansi. Manfaat lain dari pengaturan penyediaan jasa remitansi termasuk perbaikan dalam pencatatan aliran remitansi dalam neraca pembayaran yang akan memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan potensi moneter dari aliran remitansi, serta meningkatkan investasi di wilayah penerima remitansi bagi upaya pengembangan UKM.²² Informasi yang terkumpul mengenai pengiriman remitansi dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan pembayaran dan juga untuk meningkatkan perekonomian pada umumnya.

Bank Indonesia telah menerapkan transisi secara bertahap dari registrasi ke perizinan bagi agen penyedia jasa remitansi.²³ Periode transisi memberi kesempatan bagi pelaku/agen penyedia jasa yang saat ini beroperasi secara informal untuk mendaftarkan diri sampai tanggal 31 Desember 2008.²⁴ Di tahun 2008, Bank Indonesia berencana untuk mengeluarkan edaran yang merinci proses perizinan baik bagi agen baru maupun agen yang telah terdaftar, berdasarkan pengalaman dari proses pendaftaran yang sedang berlangsung saat ini. Setelah 1 Januari 2009, semua agen baru diwajibkan untuk mengajukan permohonan perizinan. Perubahan dari kewajiban mendaftar kepada kewajiban memperoleh lisensi akan berlaku setelah Bank Indonesia memperoleh gambaran mengenai kesiapan para agen penyedia jasa remitansi tersebut.

Berdasarkan peraturan baru, baik agen perorangan maupun korporasi akan dapat bertindak sebagai agen penyedia jasa remitansi secara sah. Perjanjian tertulis, termasuk hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak akan diperlukan untuk kerjasama antara para agen dan operator pengiriman uang. Perjanjian ini kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia. Kewajiban untuk registrasi dan mendapatkan lisensi hampir sama. Setelah menyelesaikan registrasi atau mendapatkan lisensi, para agen diwajibkan untuk, antara lain, mencatat transaksi pengiriman uang, menyerahkan laporan berkala dan insidental kepada Bank Indonesia, memberikan informasi

²¹ Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006 mengenai Kegiatan Pengiriman Uang.

²² Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006 mengenai Kegiatan Pengiriman Uang.

²³ Peraturan ini berlaku hanya bagi agen remitansi dan tidak berlaku untuk operator pengiriman uang seperti *Western Union* dan *MoneyGram*.

²⁴ Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006

kepada pengirim remitansi mengenai pengiriman uang, dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

KESIMPULAN

Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia secara jelas memilih mekanisme pengiriman secara informal dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara tujuan migrasi lainnya. Walaupun arus migrasi semakin meningkat, jumlah remitansi yang dikirimkan melalui sektor formal dalam koridor Malaysia - Indonesia semakin berkurang. Hanya sekitar 10 persen dari jumlah perkiraan remitansi dari Malaysia ke Indonesia yang dikirimkan melalui sistem pengiriman formal. Tingkat kecenderungan untuk memilih sektor informal adalah unik di mana TKI di negara-negara lain lebih banyak menggunakan sektor formal daripada TKI di Malaysia.



Karena koridor ini dicirikan oleh banyaknya jumlah buruh migran tidak berdokumen dan semakin meningkatnya persentase buruh migran perempuan, implikasinya adalah kedua kelompok migran ini secara khusus menganggap jasa pengiriman uang di sektor formal sulit diakses atau tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktor penyebabnya, antara lain, kurangnya akses fisik, adanya kewajiban untuk memperlihatkan kartu tanda pengenal yang tidak dapat dipenuhi, tingginya biaya dibandingkan dengan alternatif lainnya, dan semakin berkembangnya pilihan alternatif yang lebih mudah diakses. Satu industri yang tidak diregulasi telah tumbuh untuk memfasilitasi remitansi dalam koridor ini. Dalam industri ini terdapat mediator rekening, agen migrasi atau agen perekrut tenaga kerja, serta saluran-saluran informal yang menjadi bagian dari kegiatan formal (biro jasa penukaran mata uang), dan hal ini merupakan karakteristik yang signifikan dalam koridor Malaysia-Indonesia.

Formal atau informal: Perspektif buruh migran

Dari sudut pandang buruh migran, transfer informal lebih nyaman, lebih mudah diakses, atau lebih murah. Untuk sebagian dari mereka, khususnya perempuan, kurangnya akses pada kredit pra-keberangkatan untuk membayar biaya-biaya awal migrasi melalui sektor formal mendorong mereka berhubungan dengan agen perekrut tenaga kerja atau lainnya. Dalam situasi seperti ini, buruh migran diwajibkan untuk mengirim uang kembali melalui para agen perekrut atau lainnya untuk membayar hutang, walaupun sistem tersebut mungkin bukanlah yang paling menguntungkan mereka. Buruh migran tidak berdokumen, khususnya, memiliki pilihan terbatas di luar sektor informal karena status hukum mereka. Bagaimana pun, beberapa pilihan mekanisme pengiriman informal seperti mengirim uang kembali melalui kurir mungkin tidak aman dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun ada kerugian dari sektor informal, sektor formal memiliki sedikit hal saja yang dapat ditawarkan kepada buruh migran pada saat ini. Mereka kurang bersaing dalam hal akses dan memberikan hanya sedikit nilai tambah terkait dengan akses kepada kredit sebelum keberangkatan yang justru sangat dibutuhkan atau instrumen keuangan lain yang mungkin akan menarik bagi TKI, khususnya buruh migran perempuan atau buruh migran tidak berdokumen. Meskipun dalam kenyataannya sebagian buruh migran tidak mempunyai akses ke sektor formal, berkurangnya aliran remitansi formal menunjukkan bahwa sebagian yang lain lebih memilih alternatif lain. Sektor formal perlu melakukan perubahan radikal dalam cara mereka melakukan pendekatan terhadap buruh migran sebagai nasabah yang dihargai, sebagai upaya untuk dapat menarik mereka kembali ke dalam sektor tersebut. Selanjutnya, dengan pendekatan yang menempatkan kebutuhan buruh migran sebagai pusat perhatian, sektor formal memiliki potensi untuk menawarkan manfaat (keuntungan) yang besar dan dapat menempatkan buruh migran kembali ke posisi sebagai pembuat keputusan mengenai bagaimana uang mereka digunakan atau ditabung.

Formal atau informal: Perspektif pembangunan

Dari sudut pandang pembangunan, permasalahan terletak pada bagaimana remitansi dapat diterjemahkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial dan berdampak pada pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan. Jumlah remitansi yang sangat besar ke Indonesia dan arti remitansi bagi perekonomian, khususnya bagi daerah pengirim buruh migran, membenarkan adanya perhatian yang lebih besar pada masalah ini sebagai isu pembangunan. Untuk alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya, terlihat ada perbaikan-perbaikan yang signifikan yang dapat dilakukan dalam hal ini. Sekali lagi, sektor formal tidak menawarkan nilai tambah apapun ketimbang sektor informal karena sedikit saja instrumen tabungan atau investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan buruh migran, dan tidak ada usaha untuk memasarkan atau mendidik buruh migran mengenai bagaimana perbaikan dapat dilakukan, sehingga tidak ada kontribusi yang dapat berdampak pada pembangunan secara keseluruhan.

Dalam hal ini, permasalahan pentingnya bukan terletak pada pemilihan sektor formal atau informal, tetapi apakah mekanisme transfer tersebut menawarkan instrumen-instrumen yang dapat membantu buruh migran dalam menginvestasikan remitansinya secara efektif dengan keuntungan yang berkesinambungan. Jika ada mekanisme sektor informal yang menawarkan cara untuk menjangkau buruh migran dan keluarganya secara lebih efektif dan dengan instrumen yang sesuai, maka hal ini adalah juga tepat dan perlu diakui.

Formal atau informal: Sudut pandang sektor keuangan

Dari sudut pandang sektor keuangan, perubahan skenario global setelah 11 September 2001 telah menciptakan kebutuhan untuk lebih memonitor transfer uang tanpa menghambat pembangunan sektor keuangan. Namun demikian, pemutakhiran kerangka peraturan (regulasi) suatu negara, termasuk kebijakan-kebijakan *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CTF), dapat menimbulkan biaya tambahan bagi penyedia jasa pengiriman remitansi formal atau mengurangi akses mereka, dan oleh karenanya menurunkan daya saing mereka di mata buruh migran. Karena penurunan angka remitansi bersamaan waktunya dengan pemberlakuan peraturan-peraturan AML/CFT, hal ini dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam koridor remitansi Malaysia-Indonesia.

Dengan demikian, pendekatan sektor formal perlu dapat mengimbangi kerangka peraturan

dalam sektor keuangan yang ditargetkan secara tepat untuk memastikan remitansi tidak digunakan untuk tujuan-tujuan melanggar hukum, dengan cara menciptakan instrumen-instrumen dan pelayanan yang lebih baik yang menarik bagi buruh migran untuk menggunakan saluran-saluran pengiriman formal. Sektor keuangan formal harus melihat sektor informal sebagai sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk keuangan formal, yang apabila dikembangkan secara efektif, akan dapat menjaga pertumbuhan keuntungan yang berkesinambungan dan mengembangkan pangsa pasar bagi lembaga-lembaga keuangan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pihak penyedia jasa pengiriman uang, baik formal maupun informal, perlu menanggapi kebutuhan-kebutuhan buruh migran, serta sudut pandang pembangunan dan sektor keuangan. Rekomendasi untuk mencapai hal tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Menjadikan sektor formal mudah diakses dan tanggap terhadap kebutuhan buruh migran
2. Memfasilitasi buruh migran dalam mengakses sektor formal
3. Memformalkan dan meregulasi penyedia jasa informal, sekaligus menjaga aksesibilitasnya bagi buruh migran.

1. Menjadikan sektor formal mudah diakses dan tanggap terhadap buruh migran

(a) Meningkatkan efektifitas prosedur identifikasi. Baik Indonesia maupun Malaysia perlu meningkatkan pengamanan dan kebenaran dokumen identifikasi dan memastikan buruh migran mempunyai akses terhadap dokumen identifikasi yang sah dan dapat diterima, sehingga hal tersebut tidak menghambat buruh migran dalam mengakses sektor formal. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- Memperkuat keabsahan dan kredibilitas paspor nasional dengan memastikan bahwa tidak ada nomor (paspor) yang sama, dan mempelajari kemungkinan untuk menggunakan informasi biometrik (sidik jari dan sebagainya), sehingga akan sulit untuk memalsukan identitas dalam paspor.
- Memastikan agar buruh migran memiliki akses penuh atas paspor mereka dengan merubah klausul dalam *Memorandum of Understanding* yang memberikan wewenang kepada majikan untuk menyimpan paspor buruh migran.
- Melanjutkan upaya untuk mencari bentuk tanda pengenal yang sah seperti misalnya Kartu Tanda Pengenal Pekerja Migran (*Foreign Worker Card*) yang diperkenalkan di Malaysia dan memperluas akses bagi buruh migran tidak berdokumen. Sebagai contoh, di beberapa Konsulat Meksiko di Amerika Serikat, diterbitkan Kartu Tanda Pengenal Konsular (*Consular Identification Cards/CIC*), terlepas dari status keimigrasian buruh migran tersebut di Amerika Serikat dan kartu ini dapat diterima oleh sebagian bank.
- Memperlonggar persyaratan bagi perorangan untuk pengiriman uang dalam jumlah kecil. Hal ini telah dilakukan dalam koridor remitansi Korea Selatan-Mongolia di mana peraturan devisa sangat longgar dan tidak ada bukti status hukum yang diperlukan untuk setiap pengiriman sejumlah US\$1.000 (dalam satu kali pengiriman) atau US\$20.000 dalam satu tahunnya.

(b) Menyesuaikan produk dan instrumen bagi kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia. Terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan pelayanan dan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan para buruh migran. Dengan meningkatnya arus migrasi dan remitansi, potensi pasar dan usaha untuk membuka pelayanan di bidang ini juga meningkat, khususnya dalam:

- Mengenalkan pilihan-pilihan inovatif dan fleksibel untuk pengiriman remitansi seperti yang telah dilakukan di Filipina, di mana *Bank of Philippines Islands* (BPI) menawarkan empat macam sistem pengiriman dana bagi para migran asal negara ini: penyetoran (deposit) langsung ke rekening, pengambilan di kantor cabang, pengantaran uang tunai/cek (*bank draft*) dari pintu ke pintu, dan penyetoran ke rekening di bank lain.
- Menyediakan kredit pra-keberangkatan yang mudah diakses bagi buruh migran yang bekerja di sektor informal dan dengan tingkat suku bunga yang bersaing; membuatnya lebih menarik bagi buruh migran sejak awal tahapan migrasi.
- Mengembangkan instrumen tabungan, baik di negara penerima atau lewat pengiriman uang langsung ke negara asal mereka, yang dikembangkan sebagai instrumen untuk pembelian rumah atau dana pendidikan. Sistem ini dapat memberi lebih banyak hak kontrol kepada buruh migran, khususnya perempuan, dalam menentukan bagaimana uang yang mereka kirimkan tersebut akan dipergunakan.

(c) Memastikan teknik penilaian yang lebih baik atas perubahan data dan peraturan. Perbaikan dalam pengumpulan dan penanganan informasi dan dapat membantu formulasi kebijakan secara lebih baik dalam upaya memfasilitasi buruh migran dalam mengakses sektor formal. Perbaikan-perbaikan diperlukan dalam hal-hal berikut:

- Meningkatkan kualitas data, pengumpulan, dan pelaporan aliran remitansi sebagai upaya mengatasi perbedaan-perbedaan dalam pengukuran aliran remitansi antara bank sentral Malaysia dan Indonesia, serta menghasilkan angka-angka yang lebih akurat untuk tujuan neraca pembayaran di kedua negara.
- Memonitor dan menyebarluaskan informasi mengenai biaya pengiriman remitansi dalam koridor ini untuk lebih memperbaiki transparansi mengenai struktur biaya serta meningkatkan kemampuan buruh migran dalam menentukan pilihan terbaik bagi mereka. Dalam koridor remitansi Amerika Serikat-Meksiko, sebuah lembaga pemerintah Meksiko yang dikenal sebagai PROFECO, telah beroperasi melalui konsulat-konsulat Meksiko di Amerika Serikat dan melalui situsnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai biaya remitansi.
- Meningkatkan prosedur penilaian untuk dapat mengevaluasi reaksi pasar secara komprehensif terhadap peraturan-peraturan yang baru diberlakukan di Indonesia, yang memberlakukan suatu sistem registrasi bagi penyedia jasa pengiriman remitansi baru berkaitan dengan volume aliran remitansi dan kontribusinya dalam pembangunan, sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan mendatang.

(d) Memungkinkan kemitraan strategis yang mendukung di antara pihak-pihak penyedia jasa pengiriman remitansi formal dan antara yang formal dengan informal. Beberapa kemitraan strategis antara sejumlah operator formal telah dikembangkan dalam koridor ini. Kemitraan kreatif perlu didorong untuk mempersingkat waktu pengiriman dan mengurangi biaya remitansi, serta untuk meningkatkan transparansi melalui mekanisme penelusuran yang baku dan lebih baik. Mekanisme *HimalRemit* antara Qatar dan Nepal, di mana *Himalayan Bank* mengembangkan sistem berbasis internetnya sendiri untuk transaksi remitansi, telah memungkinkan bank di Nepal untuk mendistribusikan pembayaran (dana) kepada penerima begitu instruksi diterima via internet, tanpa harus menunggu uang yang dikirim telah masuk ke dalam rekening.

(e) Memperluas peran negara dalam mendorong pengiriman formal. Penelitian mengenai

pemanfaatan remitansi²⁵ memperlihatkan bahwa kebanyakan buruh migran diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah atau lembaga-lembaga keagamaan saat mereka kembali. Proses ini dapat dilakukan secara lebih transparan dan dampak pembangunan dari kontribusi tersebut dapat ditingkatkan dengan mengambil contoh dari pengalaman program “3x1” di Meksiko. Di dalam program ini, remitansi dari luar negeri yang dikirim melalui sistem-sistem formal ke dalam rekening dana proyek pembangunan berskala kecil, bagi setiap satu dolarnya akan mendapatkan tambahan tiga dolar masing-masing dari pemerintah federal, pusat, dan daerah.

2. Memfasilitasi buruh migran dalam mengakses sektor formal

(a) Mengembangkan pendidikan keuangan. Program pendidikan keuangan pra-keberangkatan saat ini dilaksanakan oleh agen perekrut tenaga kerja yang hanya memiliki sedikit insentif untuk melakukannya secara benar (dan mungkin tidak memiliki kemauan sama sekali jika mereka juga menawarkan jasa pengiriman remitansi). Di beberapa negara tujuan, konsulat Indonesia kini tengah memberikan pelatihan tambahan pada saat kedatangan para migran, walaupun kegiatan ini mungkin sudah terlambat jika para buruh migran tersebut telah terikat dengan pengaturan hutang sebelum keberangkatan. Perbaikan dapat dilakukan dengan:

- Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pelatihan dan membuka persaingan dengan mengundang lembaga-lembaga yang berbeda untuk datang dan berbicara mengenai instrumen-instrumen yang mereka tawarkan kepada para buruh migran. Di wilayah Midwest, Amerika Serikat, 55 anggota dari satu Aliansi Gugus Tugas, termasuk beberapa bank, organisasi-organisasi berbasis masyarakat (CBO), perusahaan-perusahaan pasar sekunder dan perusahaan asuransi swasta penjamin hutang, mengembangkan suatu Rencana Aksi untuk mendidik para imigran muda mengenai pilihan-pilihan keuangan dan meningkatkan kemampuan para imigran baru tersebut dalam mengakses sistem perbankan di Amerika Serikat.
- Memberikan lebih banyak informasi mengenai pelayanan dan berbagai pilihan keuangan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan Departemen Luar Negeri Malaysia, misalnya, pada saat mendistribusikan Kartu Tanda Pengenal Pekerja Migran (seperti izin kerja).
- Mendorong para majikan di sektor formal untuk memberikan pelatihan keuangan kepada pekerja mereka.
- Mengembangkan kemitraan dengan LSM, koperasi, atau pihak penyedia jasa lainnya di daerah pengirim untuk menjangkau calon-calon migran beserta keluarganya dengan memberikan pelatihan keuangan, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam membantu meningkatkan pengetahuan keuangan di desa bersangkutan.

(b) Meningkatkan akses fisik dan kelembagaan. Akses fisik, baik ke lembaga di mana remitansi dapat disetor dan dikirimkan, atau ke tempat di mana remitansi dapat diterima dan diuangkan oleh penerima, adalah faktor utama dalam memutuskan pilihan yang tepat. Untuk meningkatkan akses fisik atau kelembagaan perlu dilakukan hal-hal berikut:

- Mengembangkan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperkenalkan layanan perbankan melalui telepon selular dan mendorong lembaga keuangan untuk bermitra

²⁵ World Bank, *Use of Remittances Study* (sedang disusun).

- dengan perusahaan telekomunikasi dalam menyediakan layanan keuangan sejenis ini.
- Membangun kemitraan yang kreatif dengan pihak penyedia layanan pengiriman remitansi informal yang mungkin memiliki kemampuan dalam menjangkau buruh migran secara lebih efektif.
 - Meningkatkan kemudahan pemanfaatan lembaga-lembaga keuangan bagi kebanyakan buruh migran, khususnya perempuan, yang mungkin merasa terintimidasi oleh formalitas, terlebih lagi jika mereka tidak dilayani sebagai nasabah yang dihormati dan dihargai. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi pelatihan dan pengetahuan kepada karyawan bank mengenai kontribusi para buruh migran dalam perekonomian. Pelatihan bagi karyawan bank untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah serta membantu para migran, dapat membuat lembaga tersebut menjadi lebih bersahabat. Western Union telah merintis hal ini di banyak negara.

3) Memformalkan dan meregulasi pihak-pihak penyedia jasa informal sekaligus menjaga aksesibilitasnya bagi buruh migran

(a) Mengurangi biaya dengan meningkatkan persaingan. Dengan memperbolehkan lebih banyak pihak penyedia jasa untuk melakukan pengiriman remitansi, dampaknya terasa lamban pada biaya pengiriman itu sendiri. Misalnya, di beberapa negara Karibia dan Amerika Latin, penambahan awal jumlah penyedia jasa pengiriman remitansi menyebabkan penurunan relatif pada rata-rata biaya pengiriman remitansi. Karena biaya berkurang, persaingan semakin meningkat dan jumlah penyedia jasa menurun kembali. Namun demikian, kelihatannya hanya penyedia jasa yang efisien saja yang bertahan dalam usaha tersebut dengan biaya yang lebih rendah, sehingga biaya tetap berada pada tingkat yang lebih rendah. Penurunan biaya rata-rata untuk pengiriman remitansi sangat erat kaitannya dengan peningkatan aliran remitansi dalam koridor remitansi Amerika Serikat-Meksiko. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat pula berlaku sebaliknya, yaitu kenaikan aliran remitansi memungkinkan biaya yang lebih rendah untuk setiap pengiriman yang dilakukan perorangan, atau penurunan biaya akan mendorong lebih banyak remitansi yang dikirim ke negara asal.

(b) Perizinan dan regulasi penyedia jasa informal. Baik Malaysia maupun Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan, dalam meregulasi usaha-usaha penyedia jasa pengiriman remitansi perorangan dan korporasi informal sehingga remitansi dapat dipantau dan dilacak dengan lebih baik, sementara buruh migran juga mendapatkan akses yang lebih baik ke pelayanan yang lebih fleksibel.

- Memastikan bahwa persyaratan untuk perizinan bagi operator pengiriman uang lebih ringan daripada persyaratan untuk bank, mengingat besaran dan risiko dari industri ini. Apabila persyaratan untuk perizinan terlalu berat (seperti persyaratan jumlah modal yang besar), para pengusaha penyedia jasa penukaran mata uang mungkin akan terus menawarkan pelayanan jasa remitansi secara informal.
- Memasukkan mediator rekening sebagai bagian dari saluran formal (resmi) untuk distribusi, karena operator informal ini seringkali mempunyai akses lebih baik ke masyarakat pedesaan. Para mediator rekening ini dapat dianggap sebagai “agen remitansi”, suatu pelaku baru dalam satu tingkatan regulasi yang dibuat secara khusus.
- Memberikan pelatihan untuk para mediator rekening untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka mengelola keuangan.



Penutup

Pada akhirnya, adalah Tenaga Kerja Indonesia sendiri-lah yang menentukan pilihan mengenai bagaimana mereka mengirimkan dan menggunakan remitansi yang dikirim kembali ke Indonesia tersebut dan pilihan mereka pada saat ini jelas pada sektor informal. Asumsi utama dalam laporan ini adalah sistim yang diformalkan akan lebih meningkatkan dampak bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan keamanan dan reliabilitas, menurunkan biaya, dan meningkatkan pilihan dalam berinvestasi guna mendapatkan manfaat yang lebih baik. Bagaimana pun, perubahan besar dalam pendekatan yang diambil, diperlukan dalam sektor formal apabila mereka ingin menarik buruh migran. Sementara itu, peran penting dari sektor informal dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses harus diakui. Dan peraturan yang bertambah di sektor ini, walaupun merupakan unsur penting, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati dan sedemikian rupa agar tidak menyebabkan buruh migran kembali ke sistim pengiriman yang lebih tidak formal. Peraturan-peraturan perlu difokuskan pada upaya yang memungkinkan pasar untuk dapat berfungsi dan mendorong solusi, dan buruh migran perlu mendapat pengakuan atas kontribusi penting mereka terhadap perekonomian, serta diberdayakan dalam berinteraksi dengan pasar-pasar tersebut.

Bibliografi

- Asian Development Bank. 2006. *Workers' Remittance Flows in Southeast Asia*. Manila, Filipina.
- . 2006b. *Indonesia: Country Gender Assessment*. Manila, Filipina.
- Aggarwal, Reena, Asli Demirguc-Kunt, dan Maria Soledad Martinez Peria. 2006. "Do Workers' Remittances Promote Financial Development?" *Policy Research Working Paper 3957*. World Bank. Washington, D.C.
- Bank Negara Malaysia. 2006 *Annual Report*. Kuala Lumpur.
- . 2007. *Remittance Business. Information to be Submitted for Application*. Foreign Exchange Administration Department. Malaysia.
- . 2007. *Requirements for Operating Remittance Business*. Foreign Exchange Administration Department. Malaysia.
- . 2007. *Exchange Control Act 1953*. Malaysia.
- . 2007. *Payment Systems Act 2003*. PNMB. Malaysia.
- . 2007. *Money Changing Act 1998*. Malaysia.
- Bank Indonesia. 2007. *Balance of Payment Statistics, 2004-2006*. Jakarta.
- . 2006. "Registration of Corporate Activities of Money Remittance." Circular Letter No. 8/32/DASP, 20 Desember 2006.
- . 2006. "Bank Indonesia Promotes Rural Bank Financing for Overseas Workers." Press Release No. 8/47/PSHM/Humas, 29 Agustus 2006. www.bi.go.id/web/.
- . 2006 *Economic Report on Indonesia*. Jakarta.
- Bisnis Indonesia. 2006. "Remittance from Indonesian Migrant Labors Targeted to Reach \$3.5 Billion." web.bisnis.com.
- Consultative Group to Assist the Poor. 2004. "Financial Institutions with a Double Bottom Line: Implications for the Future of Microfinance." *Occasional Paper No. 8*. World Bank. Washington, D.C.
- De Luna Martinez, Jose. 2005. "Workers' Remittances to Developing Countries: A Survey with Central Banks on Selected Public Policy Issues." *Policy Research Working Paper WPS 3638*. World Bank. Washington, D.C.
- DeParle, Jason. 2007. "Western Union Empire Moves Immigrants Cash Home." *New York Times International*. 22 November 2007.

- Economist Intelligence Unit. 2007. *Indonesia Country Report*. Mei. London.
- . 2007. *Malaysia Country Report*. March. London
- . 2006 *Indonesia Country Profile*. London
- . 2006 *Malaysia Country Profile*. London
- Hernández-Coss, Raúl, dan Chinyere Egwuagu Bun. 2007. *The UK–Nigeria Remittance Corridor: Challenges of Embracing Formal Transfer Systems in a Dual Financial Environment*. World Bank. Washington, D.C.
- Hernández-Coss, Raúl, José de Luna Martinez, Andrea Amatuzio, Kamil Borowik, dan Frederico Logi. 2006. *The Italy–Albania Remittance Corridor: Shifting from the Physical Transfer of Cash to a Formal Money Transfer System*. World Bank. Washington, D.C.
- Hernández-Coss, Raúl. 2005. *The U.S.–Mexico Remittances Corridor: Lessons on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems*. *World Bank Working Paper No. 47*. World Bank. Washington, D.C.
- Hernández-Coss, Raúl. 2005. *The Canada–Vietnam Remittance Corridor: Lessons on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems*. *Working Paper No. 48*. World Bank. Washington, D.C.
- Hernández-Coss, Raúl, Isaku Endo, Andrea Villanueva, Chinyere Egwuagu Bun, Fred Levy, dan Paolo Ugolini. 2004. *Lessons from the U.S.-Mexico Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems*. World Bank. Washington, D.C.
- Hugo, Graeme. 2002. "Indonesia's Labor Looks Abroad." *Migration Information Source*.
- International Labour Organization. 2002. *Decent Work and the Informal Economy*. Geneva.
- International Organization for Migration. 2005. *World Migration Report*. Geneva.
- International Monetary Fund. 2006. *Balance of Payments Statistics Yearbook*. Washington, D.C.
- Khachatryan, Armine. 2007. "What Do We Need to Know about U.S. AML/CFT Regulations of Money Service Businesses: Lessons and Issues for Discussion". World Bank. Washington, D.C.
- Liow, J. 2003. "Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: In Search of Solutions." *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 25 No. 1, Hal. 49.
- Littlefield, Elizabeth. 2006. "Boom In Mobile Phones Offers New Banking Opportunities for the Poor: South Africa Study." *UN Foundations Press Release* (bersama CGAP dan Vodafone Group). www.unfoundation.org/media_center/press/2006/pr_11806.asp .
- Lyman, T., G. Ivatury, dan S. Staschen, 2006. "Use of Agents in Branchless Banking for the Poor; Rewards, Risk and Regulation." Consultative Group to Assist the Poor. Washington, D.C.
- Geertz, Clifford. 1962. "The Rotating Credit Association: A "Middle Rung" in Development." *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 10, No.3., Hal. 241-263, April.
- Orozco, M. dan R. Fedewa. 2005. "Regional Integration? Trends and Patterns of Remittance Flows within South East Asia." Asian Development Bank. Manila.

- Ramasamy, P. 2004. "International Migration and Conflict: Foreign Labor in Malaysia." Dalam Aris Ananta dan Evi Nurvidya Arifin (ed). *International Migration in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapura.
- Ratha, D. dan W. Shaw. 2007. *South-South Migration and Remittances*. Working Paper No.102. World Bank. Washington, D.C.
- Sukamdi, Elan Striawan, dan Abdul Haris, 2004. "Impact of Remittances on the Indonesian Economy." In Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin (eds), *International Migration in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapura.
- World Bank. 2006. *World Development Indicators*. Washington, D.C.
- .———. 2005. *Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration 2006*. World Bank. Washington, D.C.
- . 2002. "Migrant's Capital for Small-Scale Infrastructure and Small Enterprise Development in Mexico." Washington, D.C.
- United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2007. *International Narcotics Control Strategy Report. Vol. II: Money Laundering and Financial Crimes*. Washington, D.C.
- United Nations. 2005. "International Migration and Development." New York, N.Y.
- University of California, Davis. 2007. "Southeast Asia." *Migration News*. Vol. 14, No. 3, Juli 2007. www.migration.ucdavis.edu.